



**KOLABORASI PENGELOLAAN WANA WISATA PADUSAN DESA
PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Nimas Ristie Lestari

NIM 130910201054

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**KOLABORASI PENGELOLAAN WANA WISATA PADUSAN DESA
PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Nimas Ristie Lestari

NIM 130910201054

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sutiyah dan Ayahanda Haris Sumargo (Alm), serta Bapak Yahman yang termulia, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah luntur dan senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga tak terbalaskan selama ini;
2. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan ikhlas dan penuh kesabaran; dan
4. Almamater tercinta UNIVERSITAS JEMBER, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara

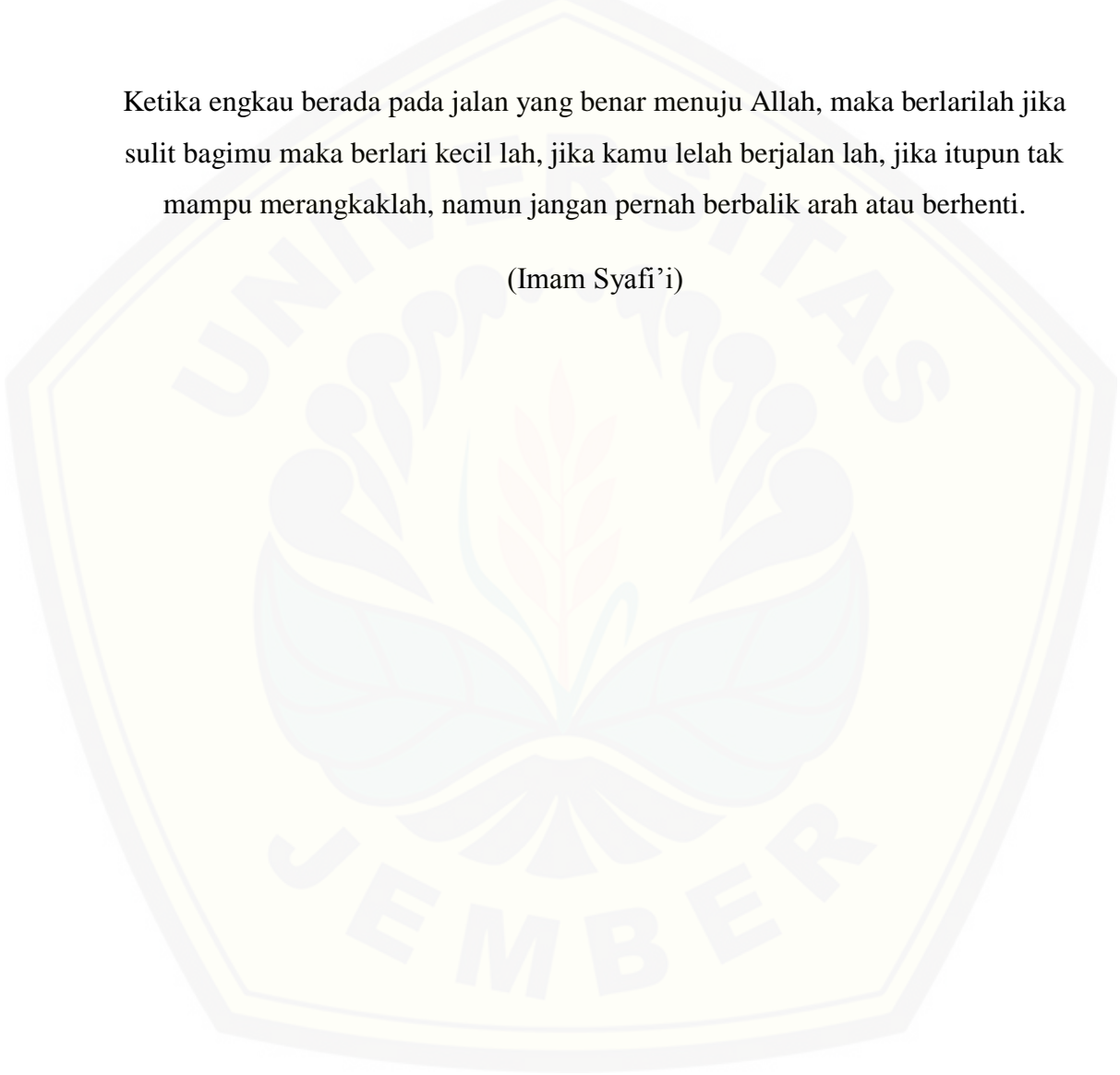
MOTO

“Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Alla ‘azza wa jall, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.”

(HR. AHMAD)

Ketika engkau berada pada jalan yang benar menuju Allah, maka berlailah jika sulit bagimu maka berlari kecil lah, jika kamu lelah berjalan lah, jika itupun tak mampu merangkaklah, namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti.

(Imam Syafi’i)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nimas Ristie Lestari
NIM : 130910201054
program studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2018

Yang menyatakan,

(Nimas Ristie Lestari)

NIM 130910201054



SKRIPSI

Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto

Oleh
Nimas Ristie Lestari
NIM 130910201054

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : **Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si**

Dosen Pembimbing Anggota : **M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 1 september 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji;

Ketua

Sekretaris,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Drs. A.Kholiq Azhari, M.S.i
NIP 195607261989021001

Anggota Tim Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP 197410072000121001
2. Drs. Agus Suharsono, M.Si ()
NIP 196308141989031023
3. Drs. Anwar, M.S.i ()
NIP 196308141989031023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto; Nimas Ristie Lestari, 130910201054; 2018: 118 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani. kolaborasi pengelolaan pariwisata adalah satu usaha untuk memajukan serta mengelola sesuatu yang sudah ada. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi bersama pihak swasta atau yang di sebut dengan *stakeholder* untuk bekerjasama dalam mengelola potensi pariwisata. Kabupaten Mojokerto memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan akan tetapi tidak semua pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto di kelola penuh Oleh Pemerintah Mojokerto, di karenakan lokasi Kabupaten Mojokerto yang lebih dominan pada daerah pagunungan sehingga pariwisata yang menjadi primadona di Kabupaten Mojokerto di kelola oleh Perum Perhutani salah satunya yakni Wana Wisata Padusan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola pariwisata yang ada yaitu melakukan Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan.

Penelitian ini menggunakan konsep pengelolaan manajemen mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengorganisasian hingga pengawasan. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana para pihak melaksanakan Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan dengan menggunakan proses perencanaan, penyelenggaraan, pengorganisasian, dan pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan analisis data interaktif yang di sampaikan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian mencakup beberapa hal. Pertama, Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani. Pada tiap tahunnya Wana Wisata Padusan menunjukkan bertambahnya wisatawan serta minat pengunjung,

pengelolaan Wana Wisata Padusan tidak luput dari bimbingan para pihak yang melakukan kerjasama. Kedua, Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani saling berdampingan dalam pengelolaan Wana Wisata Padusan tersebut. Ketiga, Dalam kolaborasi pengelolaan ini para pihak membuat perjanjian kerjasama untuk berjalannya pengelolaan Wana Wisata Padusan, perjanjian tersebut sudah di sepakati dengan masing-masing pihak dan masing-masing tanggung jawab dalam Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan. Perjanjian tersebut tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pengembangan Destinasi Wana Wisata Padusan Kabupaten Mojokerto. Keempat, selain itu para pihak juga ikut mengajak kelompok masyarakat untuk mengelolan Wana Wisata Padusan dengan baik agar masyarakat sadar akan lingkungan dan menjaga lingkungan sekitar Wana Wisata Padusan tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Kolaborasi pengelolaan Wana Wisata Padusan salah satunya yakni belum terlaksananya *masterplan* yang telah di sepakati dalam surat perjanjian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wana Wisata Padusan sehingga Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan belum terlaksana secara maksimal.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs.A. Kholiq Azhari, M.Si selaku dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran pikiran, waktu, kesabaran dan memberikan pemahaman tentang metode analisis data sehingga membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Nian Riawati S.Sos., MPA selaku dosen akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat di sempurnakan;
8. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
9. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Pihak Perum Perhutani Jawa Timur dan Pihak Pemerintah Desa Padusan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;

10. Sahabat seperjuangan: Hanik, Gita, Lilis, Ike, Afida, Billy, Danil, Alysa dan seluruh teman-teman AN angkatan 2013 khususnya teman-teman konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah (APD)
11. Sahabat saya Wahyu Dwi S, A'Idatun Nisa F, Rana Tesha V.S, Lisdiana Syafitri, Achmad Faizal C, serta sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat sehingga terselesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman UKM Persaudaraan Setia Hati Terate semuanya dan Teman-teman Pengurus, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berproses dan belajar;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember,
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Konsep Dasar	16
2.2 Good Governance	16
2.3 New Publik Management	18
2.3.1 karakteristik <i>New Publik Management</i>	20
2.4 Kolaborasi	24
2.5 Stakeholder	26
2.6 Kepariwisata	28
2.6.1 Pengertian Pariwisata	28
2.6.2 Bentuk Pariwisata	29
2.6.3 Daya Tarik Wisata	30

2.7 Pengelolaan	31
2.7.1 Prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata	33
2.7.2 Metode Pengelolaan Pariwisata	36
2.8 Kerangka Berpikir	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Tempat dan Waktu	41
3.3 Situasi Sosial	42
3.3.1 Tempat	42
3.3.2 Pelaku	42
3.3.3 Aktivitas	43
3.4 Desain Penelitian	43
3.4.1 Fokus Penelitian	44
3.4.2 Pengumpulan Data	44
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	45
3.4.4 Teknik Dan Alat Perolehan Data	46
3.4.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	46
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	46
3.5.1 Observasi	46
3.5.2 Wawancara	47
3.5.3 Dokumen	48
3.6 Teknik Penyajian Data	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Deksripsi Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Profil Kabupaten Mojokerto	54
4.1.2 Profil Desa Padusan	61
4.1.2.1 Letak dan Keadaan Geografis	61
4.1.2.2 Keadaan Penduduk	62
4.1.2.3 Kondisi Ekonomi	63
4.1.3 Wana Wisata Padusan	65

4.1.4 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Timur	67
4.2 Gambaran Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan	
4.2.1 Perencanaan	68
4.2.2 Penyelenggaraan/Pelaksanaan	94
4.2.3 Pengorganisasian.....	102
4.2.4 pengawasan	104
4.3 Kendala Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan	108
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Barang Ekspor Terbesar	1
Tabel 1.2 Perbandingan Kunjungan Wana Wisata Padusan Tahun 2014-2016.....	10
Tabel 4.1 Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2015	54
Tabel 4.2 Rincian Jumlah Sarana Social Desa Padusan	63
Tabel.4.3 Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Padusan	64
Tabel 4.4 Bentuk Kerjasama Pihak Pengelola	85
Tabel 4.5 Program Yang Dilakukan Pihak Pengelola.....	89
Tabel 4.6 Bentuk Promosi Pihak Pengelola	94
Tabel 4.7 Bentuk Pelaksanaan Pihak Pengelola	82
Tabel 4.8 Bentuk Pengorganisasian Pihak Pengelola	104
Tabel 4.9 Bentuk Pengawasan Pihak Pengelola	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Wisatawan Macanegara Melalui Pintu Masuk Juanda Pada Tahun 2015-2017	4
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 3.1 Model analisis interaktif Miles Dan Huberman	51
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mojokerto.....	56
Gambar 4.2 Peta Pariwisata Kabupaten Mojokerto	58
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padusan	62
Gambar 4.4 <i>srakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan Wana Wisata Pduan ...	71
Gambar 4.5 Struktur organisasi kelompok sadar wisata Desa Padusan.....	83
Gambar 4.6 website Perum Perhutani.....	93
Gambar 4.7 struktur kolaborasi pengelolaan Wana Wisata Padusan.....	100
Gambar 4.8 struktur kolaborasi pengelolaan Desatinasi Wana Wisata Padusan .	101

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki berbagai potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata budaya dan wisata religi. Dari banyaknya keanekaragaman wisata di Indonesia, wisata yang tidak kalah menariknya yaitu wisata alam. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki tempat yang berpotensi besar untuk dijadikan obyek wisata menarik dan dapat mendatangkan keuntungan bagi Negara. Potensi wisata alam dapat juga berada di kota dan desa berupa pemandangan alam, air terjun, taman, sungai, kebun, sawah, kebun raya, kebun binatang, arboretum, kampus dan lain-lain. Potensi obyek wisata alam ini tersebar mulai dari laut, pantai dan di gunung-gunung. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indriono Soesilo yang mengatakan bahwa,

Pariwisata adalah penyumbang devisa Negara terbesar keempat dibawah kelapa sawit, batu bara, dan karet alam, selain sektor minyak dan gas bumi. Pariwisata harus menjadi sektor unggulan untuk menjadi salah satu penyumbang devisa Negara. (<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/27/182200327/Promosi.Nusantara.Bakal.Agresif/>) diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 09.16 WIB

Berikut merupakan tabel sumber-sumber devisa Indonesia yang memberi sumbangan devisa Negara terbesar tahun 2015.

Tabel 1.1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Barang Ekspor Terbesar

No	Komoditas	Devisa (Juta USD)
1.	Minyak Dan Gas Bumi	18,552.10
2.	Batu Bara	15,943.00
3.	Minyak Kelapa Sawit	15,385.20
4.	Pariwisata	12,225.89
5.	Pakaian jadi	7,371.90

Sumber : diolah dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, 2015

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2015, pariwisata merupakan salah satu sumber devisa terbesar bagi Negara meskipun masih di bawah sumber devisa Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara dan kelapa sawit. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber-sumber kekayaan darat dan laut di Indonesia kearah pengembangan pariwisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sangat menjanjikan.

Seperti yang diungkapkan salah wahab, (1996:103) bahwa pada Negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat di jadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan Negara dalam waktu lebih singkat dari pada sektor produksi lain seperti pertanian dan industry. Pariwisata merupakan sebuah industry yang kompleks, sektor ini dapat berfungsi sebagai katup pengaman atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang makin serius di masa-masa mendatang. Di samping itu, perkembangan sektor pariwisata selain sebagai penghasil devisa Negara juga memberikan keuntungan kepada daerah, serta masyarakat yang tinggal di daerah wisata.

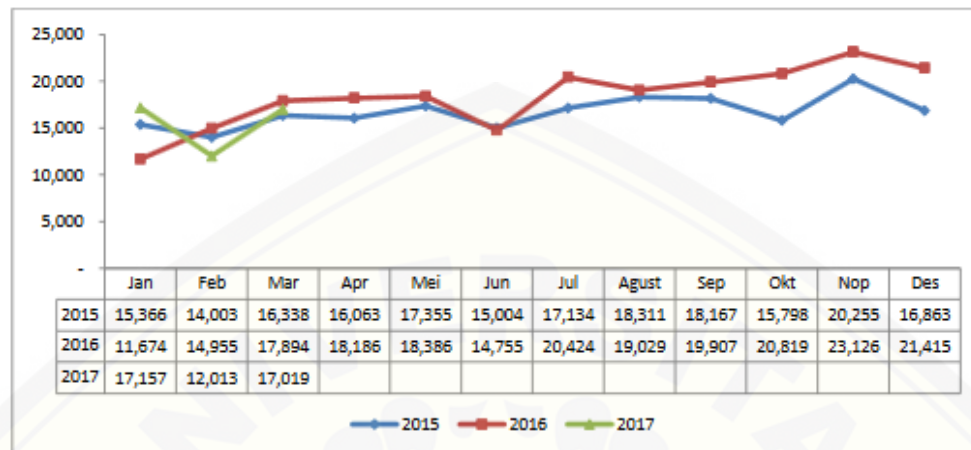
Pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun Negara. Dengan pengelolaan pariwisata yang baik, suatu Negara dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pemerintah melalui departemen kebudayaan dan pariwisata menyatakan bahwa berdasarkan perwilayaan kepariwisataan di Indonesia, telah ditetapkan pembagian wilayah tujuan wisata (WTW) dalam skala nasional. Dalam pembagian tersebut, setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai macam obyek

wisata masing-masing dan memiliki keunggulan tersendiri dalam setia obyek wisata tersebut. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa obyek wisata adalah provinsi Jawa Timur, karena menurut pembagian Wilayah Tujuan Wisata (WTW), Jawa Timur berada pada jalur perjalanan pariwisata yang cukup berpotensi dalam pariwisata dan memiliki banyak obyek wisata yang menjadi tujuan wisata nasional, sehingga Jawa Timur termasuk kawasan yang strategis dalam perjalanan wisatawan nasional. Sehubungan dengan hal itu, Jawa Timur perlu mengembangkan kembali obyek-obyek wisata yang ada secara optimal agar mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk melakukan kunjungan wisata.

Pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jawa Timur untuk melakukan perjalanan wisata melalui pintu masuk Juanda pada bulan Maret 2017 naik sebesar 41,47 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman bulan Februari 2017, yaitu dari 12,013 kunjungan menjadi 17,019 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman Januari-Maret 2017 mencapai 46,198 kunjungan atau naik sebesar 3,74 persen dibandingkan wisman periode yang sama tahun 2016 mencapai 44.523 kunjungan. Hal ini dapat diketahui dari data yang menunjukkan terus meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke pariwisata di Jawa Timur. Berikut ini merupakan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pariwisata di Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda tahun 2015-2017.

Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk Juanda Tahun 2015-2017



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur dari tahun 2015-2017 tersebut selain berdampak positif bagi sumber pendapatan langsung yang dapat dinikmati masyarakat dan daerah destinasi pariwisata itu langsung sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah tersebut, pengelolaan pariwisata juga tersebut juga merupakan sumber devisa bagi negara yang cukup besar antara sumber-sumber devisa lainnya seperti yang telah disampaikan pada tabel 1.1 sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ditambah dengan wisatawan nusantara yang berkunjung ke pariwisata yang berada di Jawa Timur, selanjutnya berimplikasi pada peningkatan devisa negara yang bersumber dari sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Jawa Timur setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu, banyak daerah-daerah di Jawa Timur yang berlomba-lomba membenahi dan mengembangkan destinasi pariwisata yang dimiliki agar menarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke destinasi pariwisatanya. Maka dari itu, pengembangan destinasi pariwisata tidak lagi hanya di pandang sebelah mata dalam pembangunan suatu daerah, tetapi sekarang ini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun negara yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian negara, daerah dan masyarakat secara luas.

Salah satu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto yang memiliki berbagai macam obyek wisata baik wisata alam, wisata religi maupun wisata sejarah yang berasal pada Sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Mojokerto adalah suatu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus. Pemerintah Daerah atau Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto memiliki peran penting dalam pengembangan dan promosi pariwisata di Kabupaten Mojokerto, 10 obyek wisata dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto masing-masing telah dilakukan secara bertahap mengenai pengembangan wisata budaya dan wisata alam agar lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan obyek wisata lainnya. Sepuluh (10) obyek wisata yang menjadi potensi wisata daerah di Kabupaten Mojokerto terdiri dari Pertitaan Jolotundo, Air Terjun Dlundung, Pemandian Ubalan Pacet, Wana Wisata Padusan Pacet, Air Terjun Coban Cunggu, Makam Religius Troloyo, Pemandian Air Panas Padusan Pacet, Eko Wisata Tanjungan, Siti Inggil, Museum Trowulan.

Salah satu wisata yang di gemari di Kabupaten Mojokerto ini adalah Wana Wisata Padusan, wisata ini merupakan wisata alam yang memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan pariwisata yang ada di kabupaten mojokerto, keunikan dari pariwisata ini adalah terdapat beberapa tempat pariwisata yang berada pada satu tempat. Terletak di kawasan lereng Gunung Welirang, dimana daerah sekitar tumbuh subur pohon pinus. Daerah sekitar merupakan kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) R. Soeryo yang digunakan untuk lokasi bumi perkemahan. Terdapat beberapa obyek di dalam kawasan wana wisata padusan yang menjadi favorit para pengunjung salah satunya yakni pemandian air panas padusan yang merupakan sumber air panas berasal dari Gunung Welirang yang masih aktif sehingga kandungan sukfur (S) di air panas padusan sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Di dalam obyek wisata air panas padusan terdapat lima kolam renang pemandian air hangat sampai panas dengan tingkat suhu yang berbeda-beda dan tersedia air panas juga dingin. Selain berendam, potensi lain milik Pemerintah Daerah yang berada di kawasan Wana Wisata

Padusan yaitu Air Terjun Grenjengan, Bumi Perkemahan Dlundung, Air Terjun Dlundung, Kolam Renang Padusan, Wire Pool Padusan, Dan Pondok Wisata Foresta Resort Padusan. Di sekitar obyek ini juga banyak terdapat hotel, villa, restoran dengan berbagai tipe dan kelas yang siap melayani wisatawan sesuai selera. Pondok wisata yang terdapat di dalam kawasan padusan yaitu Pondok Wisata (PW) grenjengan, merupakan PW yang di kelola Perhutani.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur daerah dan mengelola kekayaan daerahnya. Pengaturan terhadap hal tersebut diikuti dengan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi pemerintah daerah, hal ini menjadikan pemerintah daerah mempunyai pilihan dan wewenang dalam mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya. Hal ini sedianya dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan dan mengelola potensi di masing-masing daerah, tentu dengan mengacu pada pedoman dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi agar sesuai dengan konsep pariwisata nasional. Potensi pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah atau Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto mempunyai daya tarik wisata masing-masing untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Selain sepuluh obyek wisata tersebut masih banyak obyek-obyek wisata yang sangat potensial jika di kembangkan dan di kelola dengan baik.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah yang menjadi acuan untuk pengembangan pengelolaan pariwisata menyebutkan bahwa perwujudan pengembangan kawasan wisata alam, budaya dan buatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang pariwisata tersebut. Dengan melakukan promosi kawasan wisata melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi yang akan di lakukan tahunan maupun bulanan. Kerjasama pengelolaan pariwisata tersebut dapat di lakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. Dalam peraturan daerah Kabupaten Mojokerto

menetapkan kawasan prioritas pengembangan pariwisata alam di pusatkan di Kecamatan Pacet, dan penataan pengendalian kawasan wisata diatur secara khusus dalam perencanaan tata ruang kawasan wisata. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus bagi Kecamatan Pacet untuk mengembangkan wilayahnya. Salah satu wisata yang berada di Kecamatan Pacet yaitu Wana Wisata Padusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah menyatakan bahwa sebuah daerah kabupaten dapat melakukan usaha kerja sama dengan pihak lain. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tersebut menjelaskan bahwa kerja sama daerah merupakan kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Lebih lanjut lagi, dalam ayat 3 Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pihak ketiga yang dapat diajak kerja sama oleh daerah adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, serta lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menjalin kolaborasi dengan Perum Perhutani yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki hak pengelolaan destinasi Wana Wisata Padusan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan pihak Perhutani dalam pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Padusan. Kesepakatan perjanjian ini telah ditanda tangani bersama dari dua belah pihak, dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga , Budaya Dan Pariwisata sedangkan dari pihak Perum Perhutani oleh Kepala Devisi Bisnis Wisata Dan Agribisnis. Selain itu, untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, social dan ekonomi atas kawasan hutan yang di kelola perhutani dan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang

berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Melalui kolaborasi pengelolaan destinasi wana wisata Padusan antara Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatannya secara optimal baik dari segi ekologi, sosial dan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi kedua pihak serta masyarakat yang berada di sekitar destinasi wana wisata padusan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Perjanjian Kerja sama Pengelolaan dan Pengembangan wana wisata padusan Antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi penyelenggaraan kolaborasi pengembangan destinasi wana wisata padusan juga dalam rangka pelibatan masyarakat dalam kegiatan kolaborasi.

Perkembangan yang sangat signifikan membuat Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya mengembangkan Wana Wisata Padusan di bidang pembangunan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata:

Kerjasama ini merupakan upaya untuk mensinergikan dan menyelaraskan program kegiatan antara pemerintah kabupaten Mojokerto dalam mengembangkan potensi pariwisata dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani guna mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto. (<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:00rbg6hV1WwJ:https://www.bangsaonline.com/berita/9340/sulap-wisata-air-panas-pacet-pemkab-mojokerto-kerjasama-dengan-perhutani+&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id>, di akses pada 15 Mei 2017 pukul 14.50 WIB)

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat ikut mengembangkan destinasi Wana Wisata Padusan secara kolektif dengan Perum Perhutani. Terdapat sejumlah perubahan yang terjadi dan memberikan dampak yang signifikan dengan adanya kerjasama pembangunan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut merupakan adanya perbaikan jalan dengan ditambakkannya lampu penerangan jalan yang memadai, penambahan sarana

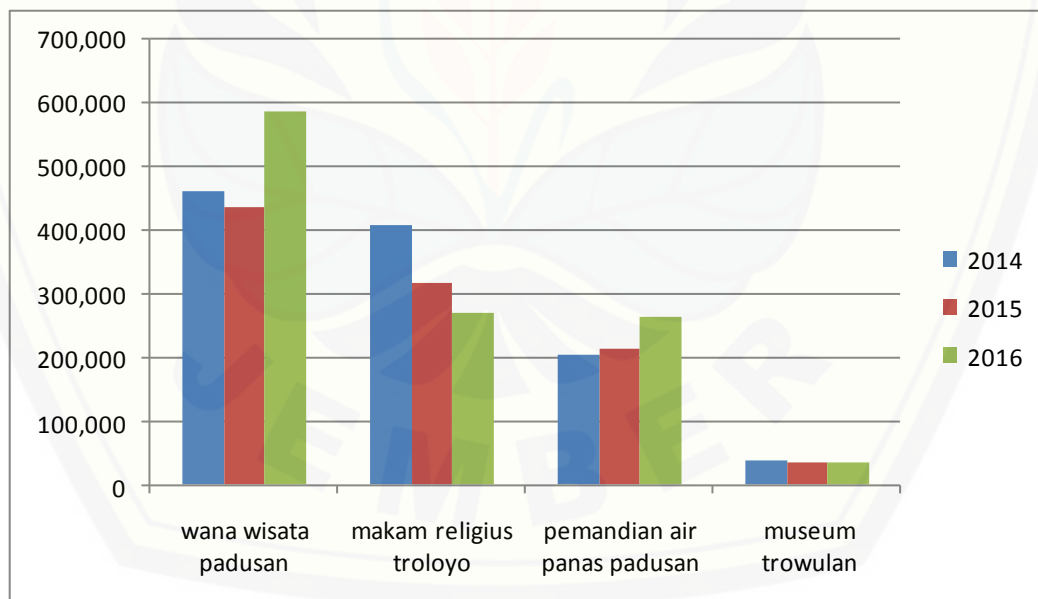
dan prasarana wisata. Dalam kerjasama pengembangan tersebut masyarakat desa padusan menerima kontribusi sebesar 5 persen dari bagi hasil penjualan karcis tanda masuk kawasan Wana Wisata Padusan.

Sebagai dasar untuk melaksanakan kolaborasi pengembangan destinasi wana wisata padusan antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan wana wisata padusan Menariknya perjanjian kerja sama ini adalah Perum Perhutani selaku pihak yang memiliki hak kelola destinasi wana wisata padusan tidak hanya sekedar memberikan izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto selaku pihak kedua dalam perjanjian untuk melaksanakan pembangunan destinasi wana wisata padusan, tetapi Perum Perhutani juga memiliki peran yang sangat besar dalam kerja sama ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Kerja sama pengelolaan dan pengembangan wana wisata padusan, Perhutani memiliki kewajiban yaitu menyusun *masterplan* pengembangan kawasan, mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana kepariwisataan, penganggaran pembangunan sarana dan prasarana, mencetak tiket masuk, memberi data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi lokasi wana wisata padusan kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto, menjaga kebersihan keamanan dan kenyamanan wisata, melaksanakan kegiatan usaha pariwisata, memberikan bagi hasil wana wisata padusan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengembangan destinasi wana wisata padusan dan lingkup kerja sama yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk mengembangkan wana wisata padusan. Berikut isi pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan wana wisata padusan:

- a. Penyusunan *Master Plan* pengembangan kawasan Wana Wisata Padusan;
- b. Pengelolaan karcis tanda masuk;
- c. Usaha jasa tempat parkir kendaraan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana;
- e. Wahana kolam renang dan pemandian air panas;
- f. Pembangunan waterboom, pasar wisata dan tempat parkir;

- g. Promosi dan pemasaran;
- h. Pemeliharaan dan pengembangan lokasi wana wisata dan sekitarnya;
- i. Peningkatan sumber daya manusia;

Menurut data yang di sampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto terkait kunjungan wisatawan yang datang ke obyek dan destinasi pariwisata di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 Hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa destinasi pariwisata yang paling banyak di kunjungi di antara destinasi-destinasi lain yang terdapat dalam wilayah pengembangan pariwisata (WPP) Kabupaten Mojokerto adalah Wana Wisata Padusan Pacet, Pemandian Air Panas Padusan Pacet, Makam Religius Troloyo, Museum Trowulan. Selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut tersebut destinasi pariwisata Wana Wisata Padusan terus mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari tabel kunjungan wisatawan terbesar menurut obyek wisata Kabupaten Mojokerto tahun 20014-2016 berikut ini :



Tabel 1.2 Perbandingan Kunjungan Wana Wisata Padusan Tahun 2014-2016

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga , Kebudayaan , dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, diolah

Dilihat dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa wana wisata padusan merupakan salah satu wana wisata yang banyak di kunjungi pada 3 tahun terakhir

di bandingkan dengan wisata lain yang berada di Kabupaten Mojokerto. Hal ini tentunya tidak terlepas dari usaha untuk mengembangkan wana wisata padusan oleh pemerintah kabupaten mojokerto dengan cara mempromosikan wana wisata padusan melalui beberapa cara dari cetak sampai elektronik. Secara geografis wana wisata padusan terletak dikawasan hutan produksi dengan kelas hutan LDTI (Lapangan Dengan Tujuan istimewa) namun, secara administratif kawasan wana wisata padusan berada di wilayah pemerintah desa padusan kecamatan pacet kabupaten mojokerto. Wana wisata padusan ini terletak di kawasan hutan Negara sehingga pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah yang di limpahkan kepada Perum Perhutani. oleh karena itu untuk mengembangkan wana wisata padusan, pemerintah kabupaten mojokerto dengan perum perhutani melakukan kerjasama.

Secara konseptual kerja sama pengelolaan dan pengembangan wana wisata padusan merupakan bagian dari manajemen publik yang menurut Ramto dalam Waluyo (2007:119) merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber daya dana dan sumber daya yang tersedia. Mengingat usaha pencapaian tujuan publik tidak selamanya bisa bertumpu kepada pemerintah (*government*), melainkan dapat melalui tata pemerintahan (*governance*) yang menurut Rosidi dan Fajriani (2013:3) diartikan sebagai suatu bangsa yang terdiri dari berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan (*stakeholder*) yang pada dasarnya terdiri dari pemerintah, masyarakat serta lembaga nonpemerintah mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat sehingga dicapai tujuan publik. Kegiatan kolektif antar pelaku-pelaku berkepentingan (*stakeholder*) seperti pemerintah, masyarakat serta lembaga nonpemerintah tersebut dalam upaya mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan publik yang telah ditentukan sebelumnya dalam konsep *governance* merupakan penerapan dari konsep *collaborative governance*. Seperti yang disampaikan oleh Morse dan Stephens (2012:566) bahwa kolaborasi merupakan pendukung pelaksanaan *governance* untuk menekankan kealamian

proses kesepakatan berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif atau kerja sama (*Collaborative is added as a modifier to governance to emphasize the nature of the process by which the various societal actors engage in collective action*). Berdasarkan definisi mengenai manajemen publik, *governance* dan kolaborasi tersebut diketahui kerja sama pengembangan wana wisata padusan merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani sekaligus masyarakat di sekitar wana wisata padusan.

Selain itu, ketertarikan peneliti untuk mengambil topik penelitian ini juga karena adanya pelibatan masyarakat di sekitar kawasan wana wisata padusan. Namun dalam hal ini pemerintah desa padusan belum membentuk BUMDes untuk mendampingi masyarakat yang ikut serta dalam pelibatan pengelolaan wana wisata padusan. Masyarakat yang ikut terlibat di dalam pengelolaan ini turut di dampingi Pokmas dalam Pengembangan destinasi pariwisata wana wisata padusan ini memiliki arti yang penting. Hal ini karena Pokmas sebagai garda depan dalam usaha kepariwisataan wana wisata padusan. Pokmas wana wisata padusan berperan sebagai pelaksana teknis usaha kepariwisataan wana wisata padusan yang dalam pelaksanaan usahanya di dampingi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto dan kepala Desa Padusan.

Berangkat dari latar belakang mengenai pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Mojokerto yang salah satunya adalah wana wisata padusan, serta menariknya kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani yang juga melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wana Wisata Padusan dalam pengembangan pengelolaan wana wisata padusan. Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang bagaimana kolaborasi yang terjadi antara Perum Perhutani, dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam usaha mengembangkan wana wisata padusan.

Strategi pemerintah kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pariwisata ada 3 tiga yakni pengembangan obyek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata agar tidak kalah dengan wisata lain dan adanya penambahan-penambahan obyek wisata seperti wisata budaya Mojopahit, promosi wisata dengan menggunakan media pemasaran melalui media cetak maupun elektronik dan juga melaksanakan program pemilihan duta wisata, pembinaan usaha wisata dengan bekerjasama dengan badan atau organisasi yang terkait dalam meningkatkan pengunjung atau wisatawan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kolaborasi pengelolaan wana wisata padusan Kabupaten Mojokerto

1. Rumusan Masalah

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa perumusan masalah merupakan proses untuk menuju kristalinitas dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Rumusan masalah penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya.

Setiap penelitian memerlukan kejelasan tentang apa yang hendak diungkapkan berupa masalah yang realistis dan patut diselidiki. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2006:93)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani dalam upaya pengelolaan Wana Wisata Padusan?”

2. Tujuan Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian diuraikan menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Sedangkan menurut (Burhan Bungin, 2012:43) menjelaskan bahwa tujuan penelitian mesti dilakukan dalam keterkaitan logis dengan fokus kajian penelitian dan kesimpulan yang berhasil ditarik setelah kegiatan penelitian selesai. Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian diatas, peneliti dapat

menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya adalah “mendeskripsikan mengenai kolaborasi antara pemerintah kabupaten Mojokerto dengan perhutani dalam pengelolaan wana wisata padusan”.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kita dapat mengharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoritis biasanya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembang konsep atau teori administrasi pada umumnya dan konsep atau teori wisata dan disiplin kerja pada khususnya. Kegunaan praktis hasil penelitian hendaknya disebutkan secara tersurat berguna bagi siapa. Misalnya, berguna bagi responden ialah agar terjadi perubahan sikap karena responden merasa diperhatikan nasibnya.

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Dunia Akademis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat member sumbangsih bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara. Khususnya terkait pengelolaan, pengembangan dan pengembangan wisata daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

b. Bagi Pemerintah

Manfaat praktis yang di harapkan bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan topic penelitian ini adalah penulisan laporan penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan positif dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan urusan kepariwisataan daerah untuk turut mengembangkan pariwisata nasional.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas, sehingga ada tanggapan yang positif dari masyarakat untuk dapat ikut mengembangkan kegiatan pariwisata.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Buku pedoman penelitian karya ilmiah Universitas Jember (2016:49) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang di bahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dan kajian-kajian sebelumnya yang di kaitkan dengan permasalahan yang di hadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika di perlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai fenomena social yang terkait dengan bagaimana kolaborasi antara Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan destinasi Wana Wisata Padusan yang meliputi :

- a. Good governance
- b. *New Public Management* (NPM)
- c. Kolaborasi
- d. Stakeholder
- e. Kepariwisata
- f. Pengelolaan pariwisata

2.2 Good Governance

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Ganie Rochman,2000:142). Pinto dalam Nisjar (1997:119) mengatakan bahwa “governance” adalah praktek penyelenggara kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga administrasi Negara (2000:5) mengartikan governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lebih lanjut lagi LAN (2000:5) menegaskan dilihat dari segi

functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Unsur utama (domain) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (governance) menurut UNDP terdiri dari tiga macam yaitu the state, the private, the private sector dan civil society organizations.

1. The state (Negara atau pemerintahan)

Diantara tugas terpenting Negara (*states*) Pada masa ke depan yang di ciptakan oleh lingkungan politik (*political environment*) adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan meredefisi peran pemerintah dalam mengintegrasikan social, ekonomi, dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat, menciptakan kometmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, social dan politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pememrintah, memperkuat financial dan kapasitas administrative pemerintah lokal, kota dan metropolitan.

Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi social, ketertiban dan keamanan, stabilisasi kondisi makro-ekonomi, meningkatkan penerimaan keunagan dan menyediakan pelayanan public dan infrastruktur yang esensial, memelihara standar keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau mengatur aktivitas ekonomi yang bersifat "*natural monopolies*" atau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum bagi warga negara.

Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat (*empowering the people*). Mereka dikehendaki memberikan layanan menyediakan kesempatan yang sama dan menjamin inklusifitas social, ekonomi, politik. Pemberdayaan (*empowering*) hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang terdiri dari sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal dan yudisial.

2. The private sector (sektor swasta)

Pasar dan sektor swasta jelas memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar (market

approach). Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa (goods and service) berjalan dengan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja, secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

3. Civil society organizations (organisasi masyarakat sipil)

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan bukan hanya tergantung pada Negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok didalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan “check and balances” terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi mereka dapat juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama yang lain.

Governance yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sejalan, tetapi harus masuk dalam kategori yang baik (good). Perpaduan antara good dan governance menimbulkan kosa kata baru, yaitu good governance, yang kemudian menjadi populer. Berkaitan dengan good governance, UNDP dalam Ismatullah (2010:179) mengajukan sembilan karakteristik yang meliputi:

1. Partisipasi (Participation)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban mengambil bagian dalam proses bernegara. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lain yang bermanfaat. Syarat utama warga Negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berperintahan, yaitu:

- a. Ada rasa kesukarelaan
- b. Ada keterlibatan secara emosional
- c. Memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung keterlibatannya.

2. Penegakan hukum (Rule of law)

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu langkah awal pencitaan good governance membngun sistem hukun yang sehat, baik perangkat lunak, perangkat kerasnya maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya.

3. Transparansi (Transparancy)

Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan public, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana public, samapi taha evaluasi.

4. Daya tanggapan (*Responsiveness*)

Upaya peningkatan daya tanggap terutama ditunjuk pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan.

5. Berorientasi pada consensus (*Consensus orientation*)

Pada *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan consensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan consensus yang telah diputuskan bersama.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda, sektor public harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring jalan.

7. Efektif dan efisien (*Effectiveness and efficiency*)

Agar mampu berkompetensi secara sehat dalam peraturan dunia, kegiatan ketiga domain dan governance harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi, dalam setiap kegiatan, tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditunjukkan pada sektor public karena sektor ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistic. Tanpa kompetisi tidak akan efisien.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan public perlu mempertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga para stakeholder.

9. Visi strategis (Strategic vision)

Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam *good governance* harus memiliki visi strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketertinggalan. Visi dapat dibedakan antara visi panjang (antara 20-25 tahun) dan visi jarak pendek 5 tahun.

Secara teoritis yang dikemukakan Tascereu dan Campos dalam Rosidi (2013:11) bahwa tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen, yaitu pemerintahan (*government*), rakyat (*civil society*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta.

2.3 *New Public Management* (NPM)

Adopsi NPM di sejumlah Negara OECD terjadi selama tahun 1980-an. Perubahan dalam manajemen public ini disebut akuntingisasi, menerima doktrin akuntabilitas publik dan administrasi public (Hood, 1993). NPM merupakan teori manajemen public yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dari praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor public perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta, misalnya terkait dengan mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes, 1998 seperti dikutip oleh Mahmudi, 2003). Filosofi dan konsep NPM diturunkan dari dua sumber yang berbeda. Sumber pertama dari praktek manajerial sektor swasta yang dikenal dengan “managerialism” dan yang kedua dari bidang ekonomi seperti teori pilihan publik, teori keagenan dan teori biaya transaksi.

Esensi managerialisme adalah bahwa manajemen adalah generik, aktivitas instrumental yang murni dan mempunyai seperangkat prinsip yang dapat

diaplikasikan baik ke dalam bisnis publik maupun swasta. Pandangan rasional dari ahli ekonomi adalah bahwa semua perilaku manusia didominasi oleh kepentingan diri sendiri dan akan cenderung memaksimalkan kekayaan. Oleh karena itu individu lebih memilih untuk kepuasan individual dan alasan efisiensi. Ini merupakan logika teori pilihan publik. Teori keagenan meletakkan argument bahwa prinsipal seharusnya berbeda dari agen sehingga prinsipal dapat mengontrol dan membuat agen akuntabel atas apa yang dihasilkan. Teori ekonomi institusional yang disebut juga teori biaya transaksional berpendapat bahwa semua individu bertindak atas kepentingannya dan lebih suka memaksimalkan manfaat untuk kepuasannya. Setiap biaya dari transaksi dipertimbangkan. Berdasarkan teori-teori ini, ada banyak aktivitas (mengurangi peran pemerintah, penghematan biaya, memperkenalkan mekanisme pasar/privatisasi, pemisahan pembeli dan penyedia, otoritas manajemen yang terdesentralisasi, manajemen kinerja, perhatian yang lebih besar terhadap kualitas) yang dikerjakan Negara-negara maju untuk membuat pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab terhadap tuntutan warga Negara (Atreya dan Armstrong, 2002) Penerapan NPM dipandang sebagai bentuk reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

Perubahan dimulai dari proses rethinking government dan dilanjutkan dengan reinventing government (termasuk di dalamnya reinventing local government) yang mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan pemerintah masyarakat. Perubahan teoritis, misalnya dari administrasi publik ke arah manajemen publik, pemangkasan birokrasi pemerintah dan penggunaan sistem kontrak telah meluas ke seluruh dunia meskipun secara rinci reformasinya bervariasi. Tren di hampir setiap Negara mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis outcome (hasil) dan penggunaan akuntansi akrual. NPM merupakan fenomena global, akan tetapi penerapannya dapat berbeda-beda tergantung factor localized contingencies (Mardiasmo, 2006).

Beberapa negara di Afrika telah mengambil manfaat dari NPM Polidano (dalam Keban 2014:246), di negara berkembang NPM masih bersifat embrio dan coba-coba. Keberhasilan dari NPM sangat tergantung dari konteks dan

karakteristik negara yang ditangani, kemampuan institusi, dan konteks dari institusi itu seperti iklim dan ideology manajemen yang dianut, sikap terhadap otoritas, hubungan sosial dan kelompok. Dalam perkembangannya NPM menuai banyak kritikan karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Apalagi teori dari NPM adalah *public choice* yang sangat didominasi oleh kepentingan pribadi sehingga konsep seperti *public spirit*, *public service*, dsb., terabaikan Kamensky (dalam Keban 2014:246). Hal tersebut tidak mendorong proses demokrasi. Disamping itu, NPM tidak pernah ditunjuk untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial. Munculnya NPM telah mengancam nilai inti sektor publik yaitu citizen selfgovernance dan fungsi administrator, bahkan jika tidak berhati-hati akan meningkatkan korupsi dan menciptakan orang miskin bau Haque (dalam Keban, 2014:247).

2.3.1 Karakteristik NPM

Tulisan tentang NPM dimulai pada awal tahun 80-an yang merefleksikan gabungan antara prinsip normative dan usaha dalam melakukan mapping pengembangan institusional pada tingkat deskriptif (Hood dan Peter, 2004). Menurut Hood (1991) walaupun beberapa penulis NPM menekankan pada aspek yang berbeda mengenai doktrin NPM, tetapi sebenarnya kalau diringkas ada tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut adalah sebagai berikut (Hood, 1991).

1. Manajemen profesional di sektor public
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada output dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor public
5. Menciptakan persaingan di sektor public
6. Pengadopsian manajemen sector bisnis ke sektor public
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Al Gore (dikutip dalam Sharma, 2007) memaparkan ringkasan singkat karakteristik dari New Public Management (NPM) : - Pemotongan pita merah :

yaitu suatu pergeseran dari sistem dimana semua orang bertanggung jawab untuk mengikuti suatu aturan yang berlaku menjadi sistem dimana mereka bertanggung jawab untuk mencapai hasil:

1. Mengutamakan pelanggan
2. Memberdayakan karyawan untuk memperoleh hasil
3. Akan kembali ke dasar dan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik

New Public Management (NPM) merupakan suatu pendekatan manajemen dan teknik tertentu yang dipinjam dari sektor swasta untuk diterapkan di sektor publik. New Public Management (NPM) bukan satu set pedoman maupun paket standar yang harus diikuti seutuhnya/sepenuhnya, melainkan merupakan suatu kombinasi dari pendekatan dan teknik yang bisa diterapkan baik itu secara kolektif ataupun sebagian sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing negara. New Public Management (NPM) adalah suatu teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen di sektor swasta dipandang lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen di sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja pada sektor public, maka perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik mana-jemen yang telah diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti contohnya dalam hal pengadopsian tentang mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering - CCT), dan adanya privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes, 1998; Broadbent & Guthrie, 1992).

Perubahan dari pandangan pemerintah lokal tradisional menjadi suatu jaringan yang lebih kompleks dalam tata pemerintahan lokal (*local governance*) menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam mengatasi keterbatasan gerak pemerintah lokal. Pemerintah lokal tidak bisa lagi bekerja terisolasi dari aktor-aktor lain dalam lingkungan yang lebih luas, baik pemerintah lokal yang lain, pemerintah nasional, aktor privat maupun aktor kemasyarakatan (*Civil Society Organization*). Dalam pandangan Rhodes (1996:652-653) konsep menegaskan keharusan adanya perubahan proses, metode dan capaian tatapemerintahan. Pada saat yang sama angin pergantian pola administrasi pemerintahan telah meletakkan peran aktor swasta sebagai kekuatan yang menggantikan kekosongan kekuasaan

yang ditinggalkan actor pemerintahan. Doktrin *New Public Management* dan didasarkan pengalaman reformasi pemerintahan di Amerika, Eropa dan New Zealand, yang dipasarkan melalui kebijakan Bank Dunia ke negara-negara berkembang. dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen pemerintahan dari konservatisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan. Dengan demikian sejalan dengan pandangan Osborn dan Gaebler (1993:109), NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta (Denhardt dan Denhardt, 2003:207) *New Public Management*. bekerja dengan dipandu oleh 5 hal penting, yaitu: (1) sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang akan dilayani; (2) privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta; (3) dilakukan dengan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan; (4) debirokratisasi dijalankan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses, dan (5) manajerialisme yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan.

Dalam perkembangannya konsep NPM mendapatkan kritikan karena terlalu berorientasi pada *profit-talking* dalam manajemen pemerintahan. Menurut para pengkritik ini seharusnya lebih menekankan kepada pemberian *service* yang baik kepada masyarakat dari kalangan manapun (prinsip demokrasi pada pelayanan publik) dan tidak melakukan diskriminasi pelayanan (*user-pay*), karena pemerintah tidak berhadapan dengan pelanggan (*customers*) tapi warga (*citizen*). Cara pandang seperti ini muncul sebagai antidote NPM yang disebut dengan (NPS).

Bagaimana konsep , NPM dan NPS (*New Public Service*) sejalan dan sepengiringan dalam pelaksanaan pemerintahan lokal? Ini dapat dipahami dengan munculnya peran dan hubungan yang baru diantara sektor pemerintahan dan sektor-sektor yang lain. *New Public Management* dan *New Public Service* memberikan *frame* yang menyediakan konteks bagi kerja dari birokrasi pemerintahan. Dengan *frame* ini konsep menjadi tidak lagi bersifat utopis tapi

operasional. Perubahan-perubahan perilaku dan cara kerja birokrasi mengantarkan kepada, (1) hubungan diantara pemerintah dan aktor lain tidak lagi dikontrol dari atas, tetapi selalu mengacu kepada negosiasi dari semua pihak; (2) manajer pemerintahan lebih terpacu untuk bekerja sama ke dalam maupun ke luar. Ke dalam dengan orang-orang pemerintahan sendiri, ke luar dengan aktor-aktor lain yang relevan; (3) Manajer pemerintahan menyadari pentingnya memahami perubahan konteks kerja di dalam organisasi dan kemitraan baru serta hubungan jaringan dengan organisasi lain (Goss, 2001:3-4).

Hal penting yang dapat diambil dari NPM adalah pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan daripada menjalankan sendiri, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wisausaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya atas asas, orientasi pada proses dan input Rosenbloom, Kravchuck (dalam Keban 2014:247). Dari paparan kelebihan dan kekurangan dari NPM, maka mengutamakan kepentingan warga negara (*citizen*). Dalam Administrasi public dimana New Public Management yang salah satu aplikasinya adalah *reinventing governance* adalah merupakan pikiran membarukan administrasi public dengan memadukan prinsip-prinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. Administrasi public juga sangat berkeinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui tatanan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa. Tata pemerintahan yang baik dan demokratis menekankan pada lokus dan focus kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan saja melainkan ada di tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen rakyat, pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras dan sebanding. Berubahnya system keseimbangan antara tiga komponen tersebut bisa melahirnya berbagai penyimpangan baik dari sisi internal maupun eksternal yang berakibat pada melemahnya peran administrasi public dalam mewujudkan *good governance*.

2.4 Kolaborasi

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antar individu, individu dengan organisasi atau antar organisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai, kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai menemukan kata sepakat.

Dalam praktik administrasi publik, kolaborasi merupakan strategi baru pelaksanaan governance untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari *multiple stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, lembaga non-pemerintah serta masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik atau mengelola program publik. Morse dan Stehens (2012:566) berpendapat mengenai *collaborative governance* yaitu :

Collaborative governance is thus an umbrella term that encompasses various interweaving strands of public administration scholarship including intergovernmental and interagency collaborative, regionalism, cross-sector partnerships, public service network (or simply network studies), consensus building, and public engagement."

Bahwa kolaborasi governance merupakan istilah umum yang mencakup berbagai untaian jalinan keilmuan administrasi publik termasuk kolaborasi antar pemerintah, antar lembaga, kedaerahan, kerjasama lintas sektor, jaringan pelayanan public, pembangunan consensus dan ketertiban publik. Sedangkan Ansell Dan Gash (2007:545) menjelaskan *collaborative governance* sebagai berikut :

A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholder in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets."

Definisi mengenai *collaborative governance* tersebut dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan aransemen pengaturan pemerintahan yang melibatkan

lebih dari satu lembaga publik bersama stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi consensus dan deliberative. Kolaborasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau mengelola aset atau program publik.

Terdapat sejumlah tahapan-tahapan dalam kolaborasi, tahapan yang pertama dalam proses kolaborasi adalah penafsiran (assessment) tahap ini membahas tentang kondisi awal yang mempengaruhi apakah kolaborasi diperlukan dan memungkinkan atau tidak. Tahapan ini dapat diartikan sebagai tahap penilaian, penilaian dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Tahapan penilaian mencakup beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Memahami faktor-faktor kontekstual seperti sejarah kerjasama dan intensif kelembagaan atau kendala kerjasama (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al., 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- b. Identifikasi stakeholder (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden. 2010, Luke, 1998 dalam Morse and Stephens (2012:568))
- c. Kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang hendak dicapai (Bryson et al., 2006; Gray, 1989; Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- d. Komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif (Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- e. Identifikasi peran kunci yang termasuk konvener, sponsor serta identifikasi sumber daya (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Bryson et al., 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))

Tahapan selanjutnya adalah inisiasi, tahapan ini mencakup kegiatan rapat stakeholder, membangun keleompok kerja dan proses desain (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989, Luke 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568)). Berbeda dengan tahapan penilaian yang lebih menekankan pada kegiatan analisis kemampuan, tahapan inisiasi lebih menekankan pada soft skill penyelenggaraan kerjasama, membangun kerjasama dan membentuk tim (Alexander, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))

Setelah berhasil membangun komitmen antar stakeholder untuk bekerjasama, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan musyawarah (Deliberation). Tahapan ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar (Gray,1989; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:568)). Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan musyawarah dan dialog sebagai bagian proses belajar bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplotasi pilihan (Carlson, 2007; Chirslip, 2002; Grey, 2008 dalam morse dan Stephens (2012;568)). Akhirnya, tahapan musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif.

Tahapan implementasi merupakan tahapan terakhir dalam membangun kolaboorasi governance, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Merancang struktur governance (Ansell & Gash, 2008 ; Bryson et al., 2006; Gray, 1989; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569))
- b. Membangun dukungan konstituen (Chrislip, 2002; Gray, 1989; linden, 2010; Luke 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569)) dan akhirnya
- c. Memantau perjanjian,evaluasi hasil dan mengelola kerjasama (chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden 2010; Luke 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569))

Tahapan implementasi ini sekaligus merupakan tahapan yang menentukan apakah kolaborasi dapat terus dilangsungkan atau harus di akhiri ketika dalam proses kerjasama terjadi suatu permasalahan.

2.5 Stakeholder

Stakeholder atau disebut juga pemangku kepentingan menurut Freeman (1983:91) dapat dipahami dengan mendefinisikan stakeholder menjadi dua definisi yaitu definisi stakeholder secara luas dan definisi stakeholder secara sempit.

- Devinisi stakeholder secara luas

Sekelompok orang atau individu yang dapat mempengaruhi atau di pengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder dalam makna luas ini meliputi kelompok kepentingan public, kelompok pennaetang, serikat kerja, pekerja, segmen pelanggan, shareowners dan stakeholder lain dalam arti luas.

- Definisi stakeholder secara sempit

Sekelompok orang atau individu dalam organisasi yang tidak mandiri untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Stakeholder dalam arti sempit meliputi pekerja, segmen pelanggan, beberapa supplier, perwakilan kunci pemerintah, shareholders, beberapa institusi keuangan dan mereka yang dapat masuk sebagai stakeholder dalam arti sempit.

Menurut Grunig dan Hunt dalam Rawlins (2006:4) terdapat empat model hubungan yang dapat mengidentifikasi kerja stakeholder yang sesuai dengan literatur kerjasama public yaitu hubungan enabling, hubungan fungsional, hubungan normatif dan hubungan campuran. Berikut ini merupakan pembahasan terkait empat model hubungan kerjasama stakeholder menurut Grunig dan Hunts.

- Hubungan enabling

Mengidentifikasi stakeholder sebagai sekelompok orang atau individu yang memiliki beberapa control atau otoritas organisasi, seperti pemegang saham, kongres, badan legislative dan regulator pemerintah serta dewan direksi. Stakeholder ini memungkinkan organisasi memiliki sumber daya dan otonomi untuk beroperasi. Ketika terjadi kemungkinan kerjasama terputus, sumber daya dapat di tarik dan otonomi organisasi dapat dibatasi.

- Hubungan fungsional

Mengidentifikasi stakeholder sebagai fungsi pokok organisasi dan dibagi menjadi fungsi input, yaitu penyediaan tenaga kerja dan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa (seperti pekerja dan suppliers) dan fungsi output, yaitu konsumsi barang dan jasa (yang meliputi konsumen, distributor, dan retailers)

- Hubungan normative

Mengidentifikasi stakeholder sebagai asosiasi atau kelompok yang dengan organisasi memiliki kepentingan bersama. Stakeholder dalam hubungan normatif berbagai nilai-nilai bersama, tujuan, masalah dan sering mencakup pesaing yang terlibat pada industry atau asosiasi profesional.

- Hubungan campuran

Mengidentifikasi stakeholder sebagai sekelompok orang atau individu yang tidak memiliki interaksi yang sering dengan organisasi, tetapi menjadi

terlibat dalam aksi organisasi. Stakeholder yang dimaksud dalam hubungan campuran ini sering muncul dalam situasi krisis. Yang termasuk dalam hubungan ini adalah media, komunitas, aktivis, LSM dan kelompok kepentingan spesial lainnya.

Berdasarkan identifikasi mengenai stakeholder tersebut. Stakeholder dalam pengembangan Destinasi Wana Wisata Padusan ini termasuk hubungan normative. Hal ini karena stakeholder yang terlibat dalam pengembangan destinasi wana wisata padusan meliputi perhutani dan pemerintah kabupaten Mojokerto yang berasosiasi atau ekerjasama dalam hubungan normative seperti berbagai nilai-nilai bersama, tujuan dan masalah pengembangan destinasi wana wisata padusan dengan tidak mengesampingkan ketertiban unsur masyarakat di sekitar destinasi wana wisata padusan.

2.6 Kepariwisataan

2.6.1 Pengertian Pariwisata

Yoeti (1990:21) mengemukakan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan bukan untuk berusaha mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang bermacam-macam. Menurut Wahab (1996:5) pariwisata adalah salah satu dari industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Sedangkan menurut MacIntosh (dalam buku Pitana dan Diarta, 2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat dalam proses menarik dan menyambut turis-turis ini dan pengunjung lainnya.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang melakukan perjalanan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dalam

memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya dan politik dan dapat menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya serta dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur definisi dasar kepariwisataan sebagai berikut.

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- c. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

2.6.2 Bentuk Pariwisata

Pariwisata terwujud dalam beberapa bentuk antara yaitu:

- a. Menurut jumlah orang yang berpergian
 - 1) Pariwisata individu
 - 2) Pariwisata rombongan
- b. Menurut maksud berpergian
 - 1) Pariwisata Rekreasi atau Sendiri
 - 2) Pariwisata Budaya
 - 3) Pariwisata Pulih Sehat
 - 4) Pariwisata Temu Wicara
 - 5) Pariwisata Sport
- c. Menurut alat transportasi
 - 1) Pariwisata Darat
 - 2) Pariwisata Tirta

- 3) Pariwisata Dirgantara
- d. Menurut Letak Geografis
 - 1) Pariwisata Domestik Nasional
 - 2) Pariwisata Regional
 - 3) Pariwisata Internasional
- e. Menurut umur
 - 1) Pariwisata Remaja
 - 2) Pariwisata Dewasa
- f. Menurut Jenis Kelamin
 - 1) Pariwisata Pria
 - 2) Pariwisata Wanita
- g. Menurut tingkat harga dan tingkat sosial
 - 1) Pariwisata Taraf Lux
 - 2) Pariwisata Taraf Menengah
 - 3) Pariwisata Taraf Jelata

2.6.3 Daya Tarik Wisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. sedangkan menurut Yoeti (dalam Utama, 2016:131) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Begitu juga dengan Pendit (2003:35), menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat. Pada dasarnya, daya tarik wisata dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Daya tarik wisata alamiah

Daya tarik wisata alamiah adalah daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna. Sunaryo (2013:25) yang

dimaksud dengan daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang dikembangkan berbasiskan anugerahkeindahan dan keunikan yang telah tersedia dialam, seperti pantai dengan keindahan pasir putihnya, laut dengan kekayaan terumbu karang atau ikannya, danau dengan keindahan panaromanya, gunung dengan daya tarik *vulcanoI*, maupun hutan dan sabana dengan keaslian *flora* dan *fauna* nya, sungai dengan kejernihan air dan kedahsyatan arusnya, air terjun dengan panaroma kecuraman dan sebagainya.

b. Daya tarik wisata buatan

Daya tarik wisata buatan merupakan hasil manusia sendiri yang terdiri dari museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan kompleks hiburan.

2.7 Pengelolaan

Menurut Herujito (2001:1) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni, manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori prinsip dan teknik pegelolaan. Manajemen sebagai seni artinya kemampuan pengelolaan menciptakan sesuatu itu. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan utuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukam dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Pengelolaan pekerjaan itu terdiri dari bermacam ragam, misalnya pengelolaan industri, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, olahraga, kesehatan, keilmuan dan lain-lain.

Menurut Balderton (dalam Westra, 1983:14), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif, material, dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. George R. Terry (dalam syafii, 1999:4) manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yaitu terdiri dari tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yaitu:

a. Perencanaan

Menurut G.R Terry (dalam mulyono 2008:23) Penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan. merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut henry fayol (dalam anwar 2010:15) di dalam pelaksanaan mencakup pengarahan, pengkoordinasian, bimbingan, penggerakan dan pengawasan. Penggerakan menurut G.R Terry (dalam suprianto 2015:164) adalah menggerakan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan baik, dengan pengertian lain menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

c. Pengorganisasian

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

d. *Controlling*

Pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target.

Beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan proses atau kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.7.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pariwisata

Menurut Sunaryo (2013:77) secara teoritis manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui ciri penyelenggaraanya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini:

a. Partisipasi masyarakat terkait.

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

b. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi lembaga swadaya masyarakat pariwisata (LSM), kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi Industri Wisata, Asosiasi Bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

c. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata dan lain sebagainya. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat kepemilikan

usaha. Lebih lanjut keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

d. Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatam-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Dalam pelaksanaanya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

e. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

f. Daya dukungan lingkungan

Daya dukungan lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasianya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara reguler sehingga dapat dilakukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus diupayakan tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi.

g. Monitor dan evaluasi program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencangkup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi

dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Pedoman atau alat-alat bantu pemantauan dan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional dan lokal.

h. Akuntabilitas lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

i. Pelatihan dengan masyarakat terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan tentang kepariwisataan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut, serta topik-topik lain yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang holistik.

j. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi pengguna lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

2.7.2 Metode Pengelolaan Pariwisata

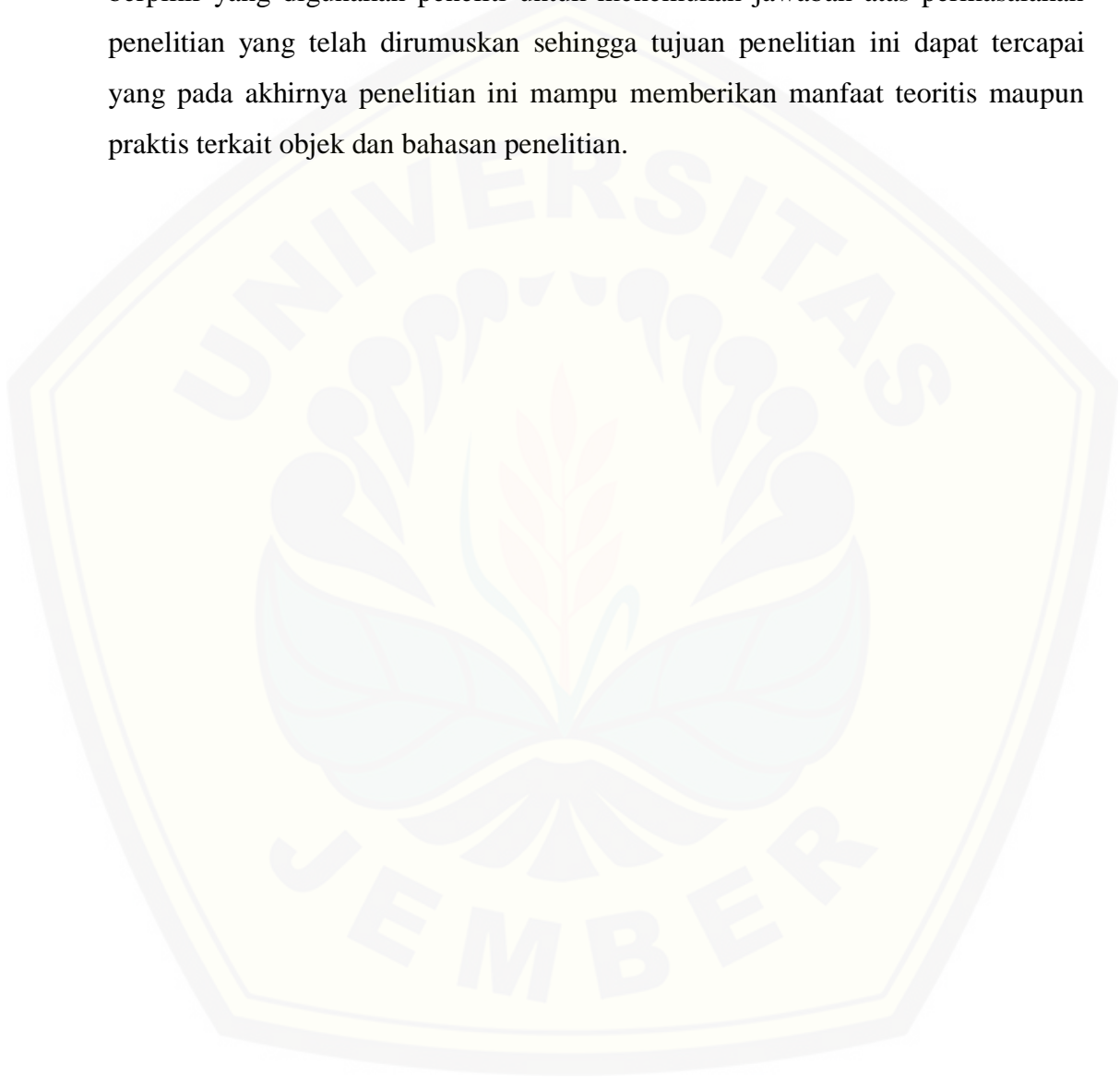
Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Menurut WTO (dalam pitana dan Diarta, 2009:88) metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut.

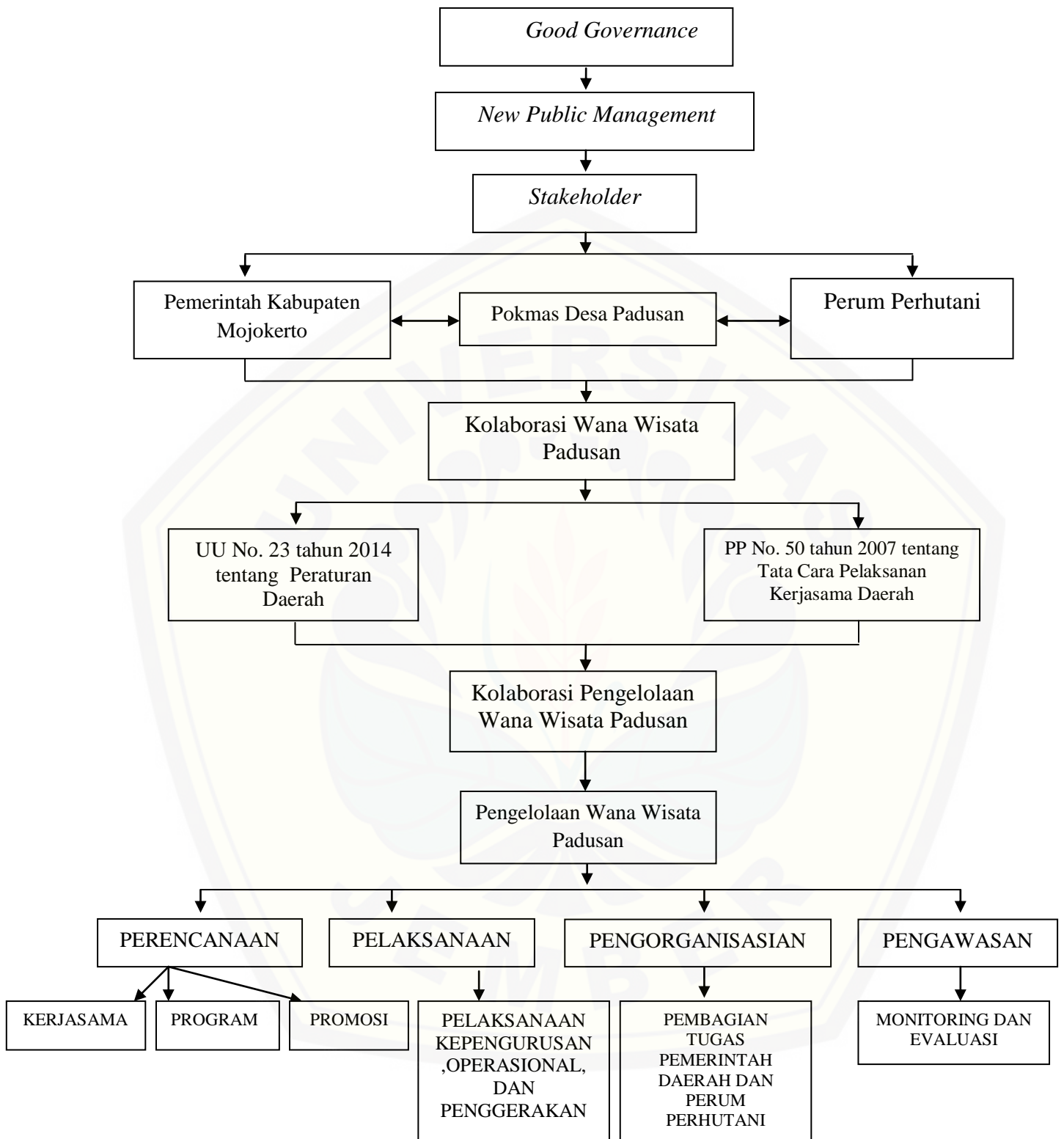
- a. Pengkonsultasian dengan semua pemangku kepentingan, hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subjek tertentu, peninjauan dalam survei, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.
- b. Pengidentifikasi isu, isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata misalnya, penyebaran dan ketimpangan pendapatan antar wilayah: pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, akomodasi dan atraksi; investasi termasuk akses kepada modal dan investasi asing; riset dan statistik pariwisata; pendidikan dan pelatihan pariwisata; dampak pariwisata; regulasi pemerintah, pajak, hubungan industrial; dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata minat khusus (pariwisata pedesaan).
- c. Penyusunan kebijakan, kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi, misi pembangunan pariwisata.
- d. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus, agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Agen ini juga bertugas melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata dan mendorong pembangunan fasilitas dan perusahaan pariwisata.

- e. Penyediaan fasilitas dan operasi, hal ini berkaitan dengan situasi dimana pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam memberi modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.
- f. Penyedia kebijakan fiskal, regulasi dan lingkungan sosial yang kondusif, hal ini diperlukan sebagai prasyarat bagi organisasi atau perusahaan untuk mencari keuntungan atau target perusahaan yang telah ditetapkan.
- g. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat, hal ini merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era dimana isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting

2.8 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kolaborasi dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Pulomerah Banyuwangi. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibangun peneliti, berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan penelitian.





BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai maksud yang diinginkan. Metode menyangkut masalah cara-kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Sedangkan metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dan Akbar, 2003:42).

Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan Penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik menguji keabsahan data
- g. Teknik Penyajian Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai dengan uraian penjelasan tersebut diatas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani serta masyarakat Desa Padusan dalam pengelolaan Wana Wisata Padusan di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan Di Wana Wisata Padusan, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Penelitian juga dilakukan di beberapa tempat untuk memperoleh data tambahan yaitu Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dan Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Timur. Waktu penelitian ini dilakukan pada 25 Agustus – 25 Oktober 2017.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi social. Situasi social terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada kasus yang di pelajari.

3.3.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan di Wana Wisata Padusan, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

3.3.2 Pelaku

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin dalam Idrus (2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Adapun pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Ketua Seksi Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto
- b. Asisten Manager Planning Produk Perum Perhutani Devisi Regional II Jawa Timur
- c. Eksekutif Manager Komunitas Bisnis Mandiri Perum Perhutani Devisi Regional II Jawa Timur
- d. Koordinator Kolam Air panas Wana Wisata Padusan
- e. Kepala Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

- f. Ketua Pokdarwis Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- g. Masyarakat sekitar lokasi Wana Wisata Padusan

3.3.3 Aktivitas

Aktivitas yang berinteraksi secara sinergis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan PKL di sekitar wana wisata padusan.
- b. Melakukan penjagaan tiket masuk, parkir, lokasi wisata.
- c. Penyediaan homestay dan obyek wisata

3.4 Desain Penelitian

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52), desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Silalahi, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian dilapangan.

Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Menurut Idrus (2009:42), dari fokus penelitian ini, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan di pastikan sewaktu penelitian sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ini memfokuskan pada proses Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan dengan menggunakan tindakan-tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan

3.4.2 Pengumpulan Data

Mengenai data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yang ada. Data primer menurut Arikunto (2010:22) merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi data kunjungan pariwisata 2017, Laporan Bulanan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2017, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Wana Wisata Padusan Antara Perum Perhutani Dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. sumber data primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh

langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam Kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Di kalangan peneliti kualitatif, istilah subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive. Terkait penentuan informan atau sumber data, menurut Faisal dalam Sugiyono (2008:221) sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya;
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Setelah dilakukan pemilihan informan secara Purposive menurut Moleong (1994) maka selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan teknik Snowball. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap pemilihan informan yang baik jika kita memakai teknik Snowball dalam pengumpulan informasi yakni :

- a. Pemilihan sample awal, yakni berupaya menemukan informan awal untuk diwawancarai

- b. Pemilihan informan lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada
- c. Menghentikan pemilihan informan lanjutan, bilamana sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.

Maka sesuai dengan penjelasan diatas, yang menjadi informan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Ketua Seksi Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto
- Asisten Manager Planning Produk Perum Perhutani Devisi Regional II Jawa Timur
- Koordinator Pemandian Air Panas Wana Wisata Padusan
- Kepala Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- Ketua Pokdarwis Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- Masyarakat sekitar lokasi Wana Wisata Padusan
- Pedagang kaki lima sekitar obyek wisata
- Pengunjung

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dapat menggunakan sebuah instrumen atau alat pengumpulan data yang tepat. Instrumen dalam suatu proses penelitian sangat penting karena kondisi data tergantung alat (instrumen) yang dibuat. Jika instrumen yang dipergunakan kurang baik, mustahil akan mendapatkan data yang baik. Jika peneliti menggunakan instrumen yang tidak bermutu, hasil yang didapat juga tidak jauh dari mutu alat pengumpulnya. Penggunaan instrumen penelitian berkaitan dengan teknik apa yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Usman dan Akbar, 2003:54). Menurut Idrus (2009:101), observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif.

Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki. Peneliti menggunakan jenis partisipasi pasif dalam penelitian ini karena peneliti nantinya akan mengamati secara langsung fenomena sosial yang ada di lapangan dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang peneliti amati. Data yang diperoleh dari metode observasi data tentang fasilitas-fasilitas pembangunan berbagai sektor.

Peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Wana Wisata Padusan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Masyarakat Desa Padusan untuk mengelola destinasi Wana Wisata Padusan. Observasi yang dilakukan peneliti ini dibantu dengan menggunakan alat-alat berupa kamera, alat perekam dan catatan penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman & Akbar, 2003:58). Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi (Silalahi, 2009:312). Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Dalam wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Maksud dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) tentang obyek penelitian yang memadai secara

langsung dari kata-kata dan tindakan informan, kemudian data dan hasil wawancara tersebut dicatat.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan semiterstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulistyo-Basuki, 2006:173). Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

3.5.3 Dokumen

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirka dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai satu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks,

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data pengunjung Wana Wisata Padusan tahun 2017, Perjanjian Kerjasama Anantara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Berkaitan dengan uji keabsahan data yang merupakan konsep sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dalam sebuah penelitian. Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2007:324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu Kredibilitas atau derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut sebagai berikut;

1. Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri, sehingga dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang di peroleh serta analisisnya. oleh karena itu menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Peneliti melakukan pengamatan terkait pengelelolaan di dalam lokasi pariwisata, pengamatan dilakukan secara spontanitas dan tidak terjadwal

2. Triangulasi

Data dalam penelitian kualitatif, diperoleh dari dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga data mencapai titik jenuh (Sugiyono, 2011:333). Moleong (2007:330) menyatakan adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan kontruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:323) triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi;

- b. Mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber;
- c. Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses cross

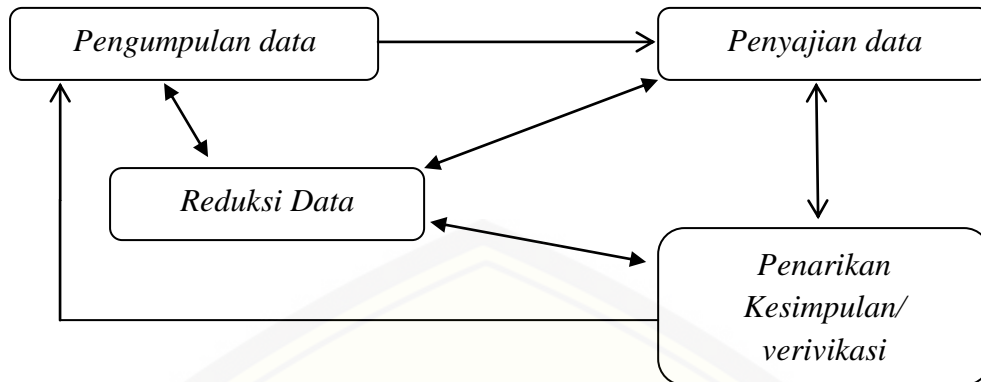
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari kebenaran yang diungkapkan oleh informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara mencocokkan antar pengumpulan data yang di dapat dari wawancara dengan data yang di dapat dari observasi atau dokumentasi.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007:248) mengemukakan bahwa:

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain.

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa analisis data merupakan tahap-tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti guna mencari, menata, dan merumuskan hipotesis rumusan secara sistematis dari observasi langsung untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang disampaikan oleh Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (1992:16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, Sumber: Miles dan Huberman dalam Denzin dan Lincoln (2009:592)

Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Idrus (2009:148), ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 2007:16). Reduksi data terjadi secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadin sangat penting

karena yang bersangkutan dapat mulai memilah dan memilih data mana dan data dari siapa yang harus lebih dipertajam..

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang menurut Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151), menyatakan bahwa dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat saja berlangsung saat pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti tersendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang dengan temuan lainnya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

Hasil analisis data disajikan secara gabungan antara informal dan formal. Informal, yaitu penguraian dalam deskripsi kata-kata (naratif). Dan juga disajikan data formal berupa bagan, tabel, gambar, grafik dan matriks.



Bab 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kolaborasi Pengelolaan Wana Wisata Padusan Desa Padusan Kabupaten Mojokerto maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kolaborasi yang melibatkan Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sekaligus dengan masyarakat namun tidak secara langsung di lakukan melalui tahapan a) tahap perencanaan dalam kolaborasi pengelolaan Wana Wisata Padusan terdapat beberapa perencanaan untuk mengembangkan obyek wisata tersebut. Perencanaan yang dijalankan masih kurang maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pembenahan PKL di lokasi Wana Wisata Padusan. b) tahap pelaksanaan pengelolaan Wana Wisata Padusan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani memiliki kendala di dalam perizinan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sudah siap dengan anggaran yang sudah di tetapkan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana di obyek Wana Wisata Padusan, namun terkait lokasi Wana Wisata Padusan yang berada di hutan yang di lindungi untuk perizinan mendirikan bangunan yang baru masih tergolong sulit. c) tahap pengorganisasian masing-masing pihak pengelola dalam hal pembagian tugasnya sudah tergolong baik, namun untuk pelaksanaan dalam pembagian tugasnya masih kurang berjalan dengan baik. d) tahap pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing pihak pengelolaan kepada masyarakat sekitar agar terciptanya kesadaran di dalam kepariwisataan. Dan masing-masing pihak juga melakukan sharing serta evaluasi setiap 6 bulan sekali.
2. Secara umum kolaborasi pengelolaan Wana Wisata Padusan menimbulkan hubungan normatif antara Perum Perhutani, Pemerintah Kabupaten

Mojokerto dan masyarakat di sekitar obyek Wana Wisata Padusan. yang terlihat dari adanya kepentingan bersama di antara *stakeholder* tersebut sehingga mereka berbagai nilai-nilai bersama, tujuan, masalah dalam pengelolaan Wana Wisata Padusan.

3. Meskipun kolaborasi pengelolaan Wana Wisata Padusan tidak sepenuhnya mencerminkan kolaborasi yang deliberatif namun adanya rapat evaluasi, koordinasi dan pembinaan sebagai wadah musyawarah antar *stakeholder* untuk menciptakan berbagai alternatif pilihan yang pada akhirnya diambil pilihan terbaik sebagai keputusan bersama secara mufakat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan kolaborasi yang deliberatif.
4. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Wana Wisata Padusan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Perum Perhutani. yakni sulitnya izin untuk pembangunan sarana dan prasarananya serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli dengan lingkungan di sekitar obyek wisata, belum sepenuhnya terlaksana pengelolaan Wana Wisata Padusan sesuai *masterplan* di dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pengembangan Wana Wisata Padusan antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu Adanya peraturan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak tertib dalam berdagang di sekitar obyek wisata dan pihak pengelola atau oknum yang melakukan pungli di lokasi Wana Wisata Padusan agar obyek wisata menjadi lebih tertib.
2. Perlu diadakannya pelestarian lingkungan yang melibatkan semua pihak pengelola maupun masyarakat sekitar obyek wisata.
3. Perlu dilaksanakan pengembangan dan pengelolaan berdasarkan *master plan* pengembangan Wana Wisata Padusan.
4. Pembangunan, pengembangan, maupun pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Perum Perhutani di obyek

pemandian air panas padusan haruslah masih mengutamakan keasrian lingkungan hutan.

5. Perlu meningkatkan komunikasi antar *stakeholder* terkait sehingga ketika terjadi permasalahan kolaborasi pengelolaan Wana Wisata Padusan, permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Yoeti, Oka. Edisi Revisi 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa Bandung.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atreya, Binod dan Anona, Armstrong, 2002, *A Review of the Criticisms and the Future of New Public Management*, Working Paper, 2002
- Azwar, Azrul. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Tangerang: BinaRupa Aksara.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
- Denhardt, J.V and R.B. Denhardt. *The New Public Service : Serving Rather Than Steering*. *Public Administration*, Nov/Dec, 60, 6, 549-559, 2000
- Keban, Yeremias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T, 2014, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Ganie, Rochman. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Peneapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Penerbit Komnas HAM Jakarta
- Hadinoto, kusudianto. 1996. *Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Hughes, O. E. 1998. *Public Management and Administration*, 2nd Ed., London: MacMillan Press Ltd.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Ismatullah, Dedi. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Bandung: CV. Pustaka setia.

- Miles, M. & Huberman, M. A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moeleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rhodes, RAW, 1996, *The New Governance: Governing without Government*, Political Studies, XLIV, 652-667.
- Rosidi, Abidarin. & Fajriani, Anggraeni. 2013. *Reiventing Government*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sharma, C. K. 2007. *New Public Management Challenges and Constrains*. Botswana: University of Botswana.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Uber. 2001. *Metode penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Syafine, Inu kencana dkk, 1999. *Ilmu Administrasi Public*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, salah. 1996. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi aDaerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Westra, Pariata. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Zaenuri, Muchamad.2012. *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep dan Strategis*. Yogyakarta:e-Gov Publishing.

Buku Terbitan Lembaga

Seksi Integrasi Pengelolaan Dan Diseminasi Statistik. 2016, *Mojokerto Dalam Angka*.Mojokerto : BPS Kota Mojokerto.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmia Universitas Jember*. Jember: University Press.

Lembaga Administrasi Negara, 2000. *Akuntabilitas dan Governance*,. Jakarta: LAN.

Jurnal

Ansell, Chris, Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance In Theory And Practice*. Oxford University Press On Behalf Of The Journal Of Public Administration Research And Theory. JPART 18543-571.

Freeman, R. Edward., David L. Red. 1983. 1983. *Stockholders And Stakeholders On Corporative Governance*.California : California Management Review.

Hood, Christopher, 1991, *A Public Management For All Seasons ?*, *Public Administration* ,Vol. 69 Spring (3-19).

Mahmudi, 2003, *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*, *Sinergi*, Vol 6 No. 1, hal 69-76.

Mardiasmo, 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, Mei, Hal 1 – 17.

Morse, Ricardo S., And John B. Stephens. 2012. *Eaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, And Case-Based Learning*. *Journal Of Public Affairs Education*. JPAE 18(3), 565-584.

Nisjar S. Karhi, 1997, *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta..

Rawlins,Brad L. 2006. *Prioritizing Stakeholders For Public Relation*. Brigham young university.

Rhodes,RAW,1996, *The New Governance: Governing without Government*, Political Studies, XLIV,652-667.

Skripsi

Karimah Anikmatul, 2016. *Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pulomerah Di Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Internet

<http://harianjayapos.com/detail-9160-pengelolaan-dan-pengembangan-wanawisata-air-panas-padusan-pacet.html> (diakses pada tanggal 14 Juni 2016)

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:00rbg6hV1WwJ:https://www.bangsaonline.com/berita/9340/sulap-wisata-air-panas-pacet-pemkab-mojokerto-kerjasama-dengan-perhutani+&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id> (diakses pada tanggal 27 Juli 2017)

<http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2016/09/05/1939/target-kan-kunjungan-1-juta-wisatawan/3> (diakses pada tanggal 31 Juli 2017)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tc5XfA8eKGYJ:jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/download/997/889+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id> (diakses pada tanggal 6 September 2017)

<http://docplayer.info/33978139-Perancangan-media-promosi-wana-wisata-padusan-sebagai-salah-satu-wisata-alam-andalan-jawa-timur.html> (diakses tanggal 22 Desember 2017)

<http://www.bumn.go.id/perhutani/berita/2084> (diakses pada tanggal 9 April 2018)

<http://maspolin.com/akbp-leo-ayo-menanam-pohon-untuk-masa-depan-anak-cucu-kita/> (diakses pada tanggal 15 Mei 2018)



LAMPIRAN
DOKUMENTASI







